

ANALISIS TENTANG STANDARD PELAYANAN MINIMUM PENDIDIKAN DASAR TINGKAT KABUPATEN/KOTA MENGUNAKAN APLIKASI TRIMS (STUDI DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA PROBOLINGGO)

Erimson Siregar

Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

E-mail: erimson_siregar@yahoo.com

Abstract: The objective of this study to determine how the achievement of the *Minimum Standard Services* (MSS) of primary and junior secondary education in the district of North Aceh and Probolinggo through the use of application TRIMS. TRIMS is the application of data collection and analysis of school attainment SPM in order to achieve basic educational services. In this study, the method used is descriptive analysis, the percentage achievement of SPM than ideal conditions.

The results of this study indicate that the MSS performance at district level in the district of North Aceh and Probolinggo the results tend to be less satisfactory, the average MSS his achievement has not reached 100 percent. That is, on the whole it was found that education in North Aceh Regency is still less developed or low views of achievement MSS. Although the condition at Propolinggo better then Aceh Utara, but almost the same thing also happened in Probolinggo.

Achievement MSS that fulfillment is the responsibility of the schools level at primary and junior secondary schools in the district of North Aceh and Probolinggo still much below 100%. Though compliance is the responsibility of the school or madrasah . Apparently much absorbed BOS allocations to meet MSS availability of teachers, which is to pay teachers' salaries.

Keywords : minimal service standard, TRIMS, primary educational

Tulisan ini dilatar belakangi oleh suatu kondisi, di mana saat ini, dapat dikatakan bahwa kondisi satuan pendidikan di Indonesia masih sangat beragam. Namun, sebagian besar kualitas satuan pendidikan tersebut masih berada di bawah Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam mencapai SNP tersebut perlu dilakukan upaya untuk meningkatkannya, yaitu dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan yang merupakan tingkat layanan minimal.

Adapun yang menjadi acuan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan minimal pendidikan dasar adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Barometer yang digunakan dalam menyusun perencanaan daerah merujuk pada indikator yang terdapat dalam Permendiknas tersebut. Dalam mencapai tujuan pembangunan khususnya di bidang pendidikan, harus disadari bahwa pembangunan harus membawa perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan dan setiap proses perencanaan harus senantiasa dilakukan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur.

Menurut Partin. (2009: 16-17). Standar telah menjadi kata yang amat lazim terdengar dalam arena pendidikan sejak tahun 1990-an. Standar akan meningkatkan pencapaian dengan cara mendefinisikan dengan jelas apa yang harus dicapai. Dengan adanya standar akan ada arah yang jelas untuk target-target yang akan

dicapai. Namun sebelum memenuhi standar tinggi, sebaiknya setiap lembaga harus memenuhi dahulu standar paling rendah yang sebaiknya ada untuk berlangsungnya layanan jasa, terutama pendidikan.

Menurut Oentarto (2004: 173), SPM atau *minimum service standard* merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. SPM memiliki nilai strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat atau konsumen. Nilai strategisnya bagi pemerintah adalah SPM dapat dijadikan sebagai *benchmark* (tolok ukur) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyedia pelayanan. Sedangkan bagi konsumen (masyarakat), SPM dapat dijadikan acuan bagi kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Rogers (1990:17), menyatakan bahwa management kinerja merupakan "*an integrated set of planning and review procedures which cascade down through the organization to provide a link between each individual and the overall strategy of organization*". Senada dengan itu, Bernstein dalam LAN (2004:8), menyatakan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, manajemen kinerja diyakini dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan dan pelaporan. Dalam konteks ini, SPM merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang meliputi (a) pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota, dan (b) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010, SPM pendidikan dasar bagi kabupaten/kota terdiri atas 14 indikator yang dikelompokkan ke dalam aspek ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi guru/kepala sekolah, serta ketersediaan, kualifikasi, kompetensi pengawas, dan frekuensi pengawasan. Adapun SPM bagi satuan pendidikan terdiri atas 13 indikator dikelompokkan dalam aspek isi pembelajaran,

proses pembelajaran, penilaian pendidikan, buku, peralatan, dan media pembelajaran. SPM pendidikan dasar dikembangkan sejalan dan berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta instrumen akreditasi sekolah/madrasah. Tujuan dari SPM untuk meningkatkan kemampuan sistem baik sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan. Dengan demikian, diharapkan berbagai fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar pendidikan hendaknya berjalan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam upaya untuk mengetahui dan menghitung pencapaian SPM tersebut, diperlukan *tool* yang tepat dalam mencapai kinerja dalam pendidikan yaitu melalui sistem TRIMS (*Tool for Reporting Information Management by Schools*). TRIMS merupakan aplikasi sistem manajemen informasi pendidikan yang sederhana namun informatif. Sederhana artinya, sistem TRIMS ini mudah digunakan serta praktis dengan menggunakan program Ms Excel versi 2003/ 2007. TRIMS merupakan aplikasi yang informatif dan memiliki beberapa fungsi sekaligus yaitu sebagai pengumpul data, juga secara otomatis menyediakan informasi bagi sekolah yang berbentuk grafik dan tabel, termasuk capaian Standar Pelayanan Minimum.

Berdasarkan buku laporan hasil perhitungan SPM menggunakan TRIMS (2012), ternyata TRIMS mendorong pergeseran peran kabupaten/kota untuk fokus pada kualitas data, analisis data, dan pemanfaatan yang optimal dan bukannya pada entri data. Menggunakan aplikasi yang terdapat dalam TRIMS akan membantu sekolah/madrasah dalam menyusun profil sekolahnya, melakukan monitoring maupun Evaluasi Diri Sekolah (EDS). menjadi penyedia bahan dalam penyusunan RKT dan RKS, bahan dialog dengan pihak sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, termasuk program BOS dan mengidentifikasi kebutuhan sekolah, termasuk melakukan simulasi

skenario program/kebijakan di sekolah dengan mudah dan cepat. Melalui aplikasi TRIMS, diharapkan hasilnya dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun potensi dan pengembangan kapasitas daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana ketercapaian SPM di daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Probolinggo melalui penggunaan aplikasi TRIMS sebagai aplikasi yang valid untuk menjadi alat pendataan sekaligus analisis ketercapaian SPM dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar pendidikan.

METODE

Kajian ini merupakan studi kasus, dengan mengambil lokasi penelitiannya di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Probolinggo. Keduanya dapat disebutkan sebagai daerah yang pelayanan pendidikannya berada pada level moderat dan maju. Dalam upaya mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), daerah ini telah menggunakan aplikasi TRIMS sebagai aplikasi yang valid untuk menjadi alat pendataan sekaligus analisis ketercapaian SPM dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar pendidikan. Adapun analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan menghitung prosentasi sebagai dasar ketercapaian SPM. Di Aceh Utara semua sekolah sudah mengumpulkan data sementara di Kota Probolinggo ada beberapa sekolah/madrasah yang tidak mengumpulkan data, yaitu ada 2 (dua) SD, 3 (tiga) MI, 2 (dua) SMP, dan 4 MTs yang tidak mengumpulkan data. Namun demikian, hasil analisis dianggap sangat akurat sebab sekolah/madrasah yang tidak mengumpulkan data adalah yang capaian SPMnya lebih tidak memadai dibanding yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan pada cakupan layanan pendidikan tersebut maka dirumuskanlah

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Adapun yang menjadi fokus utama SPM meliputi:

- a. Ketersediaan dan Keterjangkauan yang terdiri atas
 1. Distribusi sekolah
 2. Rombel dan Ruang Kelas
 3. Sarana Ruang Kelas
- b. Kualitas/Mutu dan Relevansi yang terdiri atas
 1. Laboratorium
 2. Alat Praktek Siswa
 3. Sarana Ruang Laboratorium
 4. Ketersediaan Ruang Guru
 5. Kecukupan Guru
 6. Kualifikasi Guru
 7. Sertifikasi Guru
 8. Buku Teks
- c. Kesetaraan/Kepastian dan Keterjaminan yang terdiri atas
 1. Ruang Kepala Sekolah
 2. Kualifikasi Kepala Sekolah
 4. Kualifikasi Pengawas
 5. Supervisi Kepsek
 6. Laporan dan evaluasi

SPM pendidikan dasar merupakan tahap awal implementasi SNP yang mencakup delapan standar, yakni (1) standar isi, (2) proses, (3) pendidik dan tenaga kependidikan, (4) sarana dan prasarana, (5) pengelolaan, (6) pembiayaan, (7) evaluasi pendidikan, dan (8) kompetensi lulusan. Artinya SPM dielaborasi dari delapan standar nasional pendidikan.

1. Pencapaian SPM Tingkat Kabupaten/ Kota

Dipandang dari sisi tanggungjawab pemenuhan, SPM dapat dibagi atas dua kelompok , yaitu (1) SPM Tingkat Kabupaten/Kota, yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab kabupaten/kota, dan (2) SPM tingkat satuan sekolah, yaitu yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab sekolah.

Hasil keluaran aplikasi TRIMS tentang capaian SPM tingkat kabupaten/kota untuk Kabupaten Aceh Utara dan Kota

Probolinggo dapat dibuat dalam satu tabel seperti Tabel.1.

Secara umum, capaian yang ditunjukkan oleh Tabel 1. hasilnya masih banyak yang belum mencapai 100% sebagai

syarat mutlak pencapaian SPM. Masih ada capaian yang hanya 15% yaitu kualifikasi guru di SMP di Aceh Utara bahkan untuk MTs di kabupaten yang sama hanya 9%,

Tabel 1 Pencapaian SPM Tingkat Kabupaten/kota untuk Kabupaten Aceh Utara dan Kota Probolinggo

No	Indikator	Target Nasional 1 2014 dlm %	Capaian dlm %							
			Kab. Aceh Utara				Kota Probolinggo			
			SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki	100	43	27	37	35	100	100	100	100
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang (tingkat SD/MI) dan tidak melebihi 36 orang untuk SMP/MTs	100	92	91	84	94	55	100	100	100
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA	100			54	18			73	29
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100	38	38	52	38	95	100	86	79
5	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	100	99	97			100	100		
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	100			98	100			100	100
7	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	100	77	72			93	67		
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	100			16	15			64	43
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	100			12	9			50	14
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	80	84			90	71		
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100			90	82			91	57
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	100	0	100	50	100	100	100	100
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	100	50		50		100	100	100	100
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100	60	31	41	15	61	81	73	64
N (Jumlah sekolah/Madrasah) yang mengumpulkan data			323	32	90	34	104	22	23	13

Sumber: 1. Buku Laporan Hasil Perhitungan SPM Menggunakan TRIMS Kab Aceh Utara (2012)

2. Buku Laporan Hasil Perhitungan SPM Pendidikan Dasar Kota Probolinggo (2012/2013)

2. Pencapaian SPM tingkat Satuan Pendidikan

Selain SPM yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab pihak kabupaten/kota, dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 juga ditentukan ada 13 SPM yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Hasil dari agregasi

pendataan TRIMS pada sekolah di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Probolinggo dapat di lihat pada Tabel 2.

Pada Tabel. 2 dapat di lihat bahwa capaian tentang SPM no 5 yaitu masih ada yang 1%. Artinya selain hanya mengajar, guru hampir tidak pernah tinggal di sekolah

untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran, evaluasi dll.

Tabel 2. Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan

No	Indikator	Target Nasional 1 2014 dlm %	Capaian dlm %							
			Kab. Aceh Utara				Kota Probolinggo			
			SD	MI	SM P	MTs	SD	MI	SM P	MTs
1	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah.	100	88	88			96	100		
2	Setiap SMP dan MTs menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah.	100			70	82			91	86
3	Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan .	100	100	100			26	14		
4	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	100	53	47	42	18	79	48	50	36
5	Setiap guru tetap bekerja 35 jam per minggu di satuan pendidikan .	100	2	6	1	3	28	5	9	76
6	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun	100	70	72	66	76	96	86	82	93
7	Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.	100	69	59	67	59	96	100	73	93
8	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).	100	18	19	17	18	71	29	41	57
9	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	100	22	22	14	21	83	38	55	36
10	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik	100	15	19	14	6	71	29	41	57
11	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik	100	81	78	71	74	96	100	91	79
12	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).	100	81	78	71	74	96	100	91	79
13	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	100	83	75	82	76	95	86	82	100
N (Jumlah sekolah/Madrasah) yang mengumpulkan data			323	32	90	34	104	22	23	13

Sumber: 1. Buku Laporan Hasil Perhitungan SPM Menggunakan TRIMS Kab Aceh Utara (2012)

2. Buku Laporan Hasil Perhitungan SPM Pendidikan Dasar Kota Probolinggo (2012/2013)

Pembahasan

1. SPM Tingkat Kabupaten/Kota

Di Kota Probolinggo capaian akses pendidikan tidak melebihi jarak yang ditetapkan dalam ketentuan SPM, namun di Kabupaten Aceh Utara hal ini masih menjadi masalah. Dipastikan bahwa faktor geografis di kabupaten merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan belum maksimalnya capaian ini. Kebijakan yang dapat ditempuh oleh kabupaten adalah membangun sekolah di daerah terpencil sekalipun. Bila jumlah siswa tidak memenuhi, sebaiknya dapat dibangun sekolah kecil atau sekolah satu atap.

Untuk SPM no 2, faktanya, masih terdapat sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Kebijakan yang dapat ditempuh oleh daerah adalah pembatasan penerimaan siswa sesuai

kuota atau menambah ruang kelas baru bagi sekolah-sekolah tertentu.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa belum semua SMP/MTs memiliki laboratorium IPA. Untuk itu optimalisasi penggunaan dana DAK dapat juga difokuskan untuk pencapaian hal ini.

Ketersediaan kantor guru, ruang kepala sekolah hanya untuk MI Kota Probolinggo yang capaiannya 100%, selainnya masih belum tercapai bahkan capaian untuk jenjang SD masih sangat rendah. Hal ini memang sering luput dari perhatian pemerintah daerah sehingga jarang kebijakan yang dilakukan untuk memenuhi hal ini.

Ketersediaan guru, umumnya sudah memadai, namun penelusuran lanjut atas data dan analisis TRIMS Kab. Aceh Utara dan Kota Probolinggo, ternyata kekurangan guru

PNS sangat besar, terutama untuk jenjang SD/MI. Banyak guru yang diangkat untuk pemenuhan SD Inpres tetapi belum diangkat penggantinya. Sebagai penggantinya, sekolah mengangkat guru honor.

Kualifikasi akademik guru di kedua daerah masih memprihatinkan. Bahkan kualifikasi pengawas MI di Aceh Utara capai 0%. Kebijakan yang dapat ditempuh oleh kabupaten/kota adalah memberi beasiswa penuh pada guru-guru untuk melanjutkan pendidikannya. Namun hal ini dianggap akan sangat memberatkan anggaran daerah terutama Kabupaten Aceh Utara yang kualifikasi gurunya sangat rendah. Perlu terobosan lain yang dianggap tidak memberatkan anggaran daerah.

2. SPM Tingkat Satuan Pendidikan

Secara umum, SPM yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan masih banyak yang belum tercapai 100%. Untuk itu sekolah harus menjawabnya melalui Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Pemenuhannya dapat dilakukan menggunakan alokasi dan BOS dan alokasi lain dari berbagai pihak yang tidak mengikat dan tidak dibebankan pada siswa.

Capaian yang sudah mendekati termasuk tinggi adalah pemenuhan buku teks, tetapi ternyata rata-ratanya belum sampai 100%. Artinya masih perlu penambahan buku sesuai data yang ada di masing-masing sekolah/madrasah.

Penerapan RPP juga masih kurang memuaskan. Pada pendataan awal, capaian ini sangat tinggi namun setelah divalidasi ternyata banyak guru yang tidak membuat sendiri RPPnya, namun membeli atau copy paste dari RPP lain. Kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah adalah pelatihan dan pendampingan yang kuat melalui pengawas tentang pengembangan RPP.

Hal yang paling memprihatinkan adalah capaian tentang pemenuhan jam kerja guru di sekolah/madrasah. Hanya di MTs Kota Probolinggo yang capaiannya 76% selainnya kisarannya 1% s.d 9%. Artinya,

kecenderungan fakta bahwa selain hanya saat mengajar, hampir tidak ada guru yang tinggal disekolah untuk melakukan pengembangan RPP, analisis pembelajaran dan evaluasi diri. Pemenuhannya dapat dilakukan melalui pendampingan yang kuat dari pengawas dan kepala sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa capaian yang ditunjukkan oleh Pelayanan Pendidikan Dasar pada tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Probolinggo hasilnya cenderung kurang memuaskan, yaitu rata-rata pencapaian SPM-nya belum mencapai 100 persen. Artinya, secara keseluruhan ditemukan bahwa pendidikan di Kabupaten Aceh Utara masih kurang maju atau rendah dilihat dari pencapaian SPMnya. Walau kondisinya lebih baik, ternyata hal yang hampir sama juga terjadi di Kota Probolinggo.
2. Capaian SPM yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Probolinggo juga masih banyak yang di bawah 100%. Padahal pemenuhannya adalah tanggung jawab sekolah atau madrasah tersebut.
3. Ternyata alokasi dana BOS banyak terserap untuk pemenuhan SPM ketersediaan guru, yaitu untuk membayar guru honor. Akibatnya alokasi dana BOS untuk pencapaian SPM lainnya menjadi terbatas.

Saran

Sesuai ketentuan perundangan, SPM pendidikan dasar sudah harus tercapai pada tahun 2014. Bahkan auditor BPKP di Aceh Utara mensyaratkan agar daerah menggunakan SPM sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah. Namun kenyataannya masih sedikit kabupaten /kota yang mau memperhatikan hal ini. Bahkan masih banyak yang belum mencoba

melakukan pendataan dan analisis SPM di daerah masing-masing apalagi merencanakan pemenuhannya. Untuk itu, seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah sebaiknya mau lebih serius memperhatikan pemenuhan SPM ini. Sangat tidak baik merencanakan pembangunan sekolah/madrasah bertaraf internasional, tetapi SPM sendiri belum tercapai.

www.menkokesra.go.id. Kemendiknas *Targetkan Capai Standar Pelayanan Minimal pada 2013*. Diunduh pada tanggal 8 April 2013, 16.45 WIB.

www.wapikweb.org. *TRIMS*. Diunduh pada tanggal 9 April 2013, 14.40 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara. 2012. Hasil Audit BPKP atas kinerja Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara.
- LAN. 2004. *Sistem Manajemen Kinerja Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah.
- Oentarto, dkk. 2004. *Menggagas Format Otonomi daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Partin, Ronald L., 2009. *Kiat Nyaman Mengajar di Dalam Kelas. Strategi Praktis, Teknik Manajemen, dan Bahan Pengajaran yang pat Diproduksi Ulang badi Para Guru Baru maupun yang Telah Berpengalaman. Jilid 2*. Jakarta: PT Indeks.
- Roger, Steve. 1990. *Performance Management in Local Government*. Great Britania:Logman.
- World Bank. 2013. *Buku Laporan Hasil Perhitungan SPM Menggunakan TRIMS (Tool for Reporting and Information Management by Schools)*. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara ahun 2012.
- World Bank. 2013. *Buku Laporan Hasil Perhitungan SPM Pendidikan Dasar Kota Probolinggo tahun 2012/2013*.